

MEDIA KALTIMTARA

RABU,
4 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



PERCEPATAN & PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH TAHUN

"Sinergi Nasional untuk Akselerasi Digitalisasi Daerah
dalam Mendukung Indonesia Maju"

Jakarta, 4 Oktober 2023



TARAKAN RAIH PENGHARGAAN KOTA TERBAIK TP2DD TAHUN 2023

BACA HALAMAN 2



DLH Uji Kualitas Udara di Tarakan, Hasilnya Keluar Hari Ini

BACA HALAMAN 15



ISTIMEWA

Tarakan Raih Penghargaan Jadi Kota Terbaik TP2DD Tahun 2023.

Tarakan Raih Penghargaan Jadi Kota Terbaik TP2DD Tahun 2023

JAKARTA – Tarakan meraih penghargaan sebagai kota terbaik dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto kepada Wali Kota Tarakan, Khairul, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Selasa, (3/10/2023).

Adapun penghargaan diberikan kepada provinsi, kota, kabupaten, program P2DD, dan Bank Pembangunan Daerah terbaik. Selain Tarakan, terdapat daerah lain yang juga meraih penghargaan ini, diantaranya Tebing Tinggi, Bogor, Makassar, dan Jayapura. Di kesempatan itu, Wali Kota yang

sekaligus merupakan ketua TP2DD Tarakan mengucapkan rasa Syukur atas penghargaan ini. Khairul menekankan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh tim TP2DD, termasuk dari unsur Bank Indonesia (BI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimara Cabang Tarakan.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Tarakan, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat secara langsung dalam upaya digitalisasi daerah,” ucapnya.

Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk terus mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Terlebih, visi Kota Tarakan sebagai kota maju dan

sejahtera melalui smart city menjadi landasan untuk terus meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dikatakannya, percepatan dan perluasan digitalisasi di Kota Tarakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah mengalami kemajuan yang signifikan. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan dari sebelumnya di 2022 lalu di angka 93 persen, kembali mengalami peningkatan menjadi 97,5 persen berkat implementasi transaksi non tunai yang semakin diperluas di lingkup Pemkot Tarakan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Madri Harap Perusahaan Nakal di Berau Bisa Ditindak Tegas

TANJUNG REDEB – Adanya kasus mengenai perusahaan yang tak memenuhi hak karyawannya disoroti Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dirinya pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil tindakan tegas.

Dirinya mengaku beberapa pekan terakhir menerima kabar banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak maryawan.

“Saya sempat mendengar adanya beberapa perusahaan yang sempat bermasalah terkait dengan gaji karyawan,” jelasnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi persoalan tersebut. “Artinya dalam satu bulan itu satu per satu masalah diselesaikan. Dan untuk masalah perusahaan saya meminta bupati untuk bisa membuat regulasi terkait permasalahan ini,” tuturnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta kepada OPD terkait untuk lebih tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan.

“Berikan sanksi yang sesuai dengan aturan. Jangan sampai pemerintah dipermainkan mereka. Maka dari

itu, saya tekankan agar selalu tegas mengatasi permasalahan ini, apalagi hal serupa juga tidak sekali dua kali terjadi,” katanya.

Bagi perusahaan, Madri meminta agar bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi.

“Saya tekankan juga kepada seluruh perusahaan untuk mengikuti regulasi yang ada. Saya harap perusahaan jangan menahan atau tidak mengeluarkan hak-hak para karyawan yang sudah bekerja,” tandasnya. (adv/and)

Bupati Miliki Hak Prerogratif dalam Pilih Sekda, Rahman: Yang Ditunjuk Pasti Berkompeten



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman

TANJUNG REDEB - Proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau sudah mencapai titik akhir. Tiga calon sudah diseter oleh tim panitia seleksi (Pansel) sesuai dengan tahapan yang dilalui.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman menilai tim pansel sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Itu terbukti dengan menghasilkan tiga ASN terbaik di Kabupaten Berau untuk menduduki jabatan ASN tertinggi di Bumi Batiwakkal.

“Tiga nama itu pasti sudah memenuhi secara seluruh persyaratan. Saya harap siapapun yang ditunjuk sanggup menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kabupaten Berau,” katanya.

Rahman mengaku siapapun yang akan ditunjuk menjadi Sekda Berau, itu merupakan kewenangan hak prerogatif Bupati.

“Biarkan Bupati memilih. Siapapun yang dipilih pasti berkompeten. Kalau diibaratkan, bupati memejamkan mata saja memilih 3 nama itu sah sah saja. karna sudah melalui pansel,” katanya.

“Jadi, bagusnya kita tidak melakukan intervensi kepada bupati. Karena, Sekda ini tidak ada hubungan dengan agama, suku atau apapun,” jelasnya.

Kendati demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan siapa pun pilihan Bupati mengenai Sekda adalah pilihan terbaik. “Jadi biarkan saja bupati memilih sendiri sekda yang menurut dia terbaik,” pungkasnya. (adv/and)

Kabut Asap Mulai Menyelimuti Berau, Rudi Dorong Gerak Cepat OPD Terkait

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi I DPRD Berau Rudi Parasian Mangunsong meminta Pemkab Berau melakukan pengecekan kadar kepekatan udara. Hal itu dilakukan seiring kabut asap beberapa hari belakangan yang menerpa langit Berau dan menyulitkan aktivitas masyarakat setiap kecamatan.

“Saya juga mengimbau kepada instansi terkait untuk segera lakukan progres kadar kepekatan udara,” ungkapnya.

Dengan begitu, maka cara penanganannya bisa segera dirumuskan. Sebab, jika menunggu kondisi kabut asap tebal, akan membahayakan masyarakat.

“Karena ini kan bisa dibilang termasuk bencana ya. Saya harap BPBD juga bisa aktif berikan masker buat anak sekolah,” tuturnya.

Sebab menurutnya, efek kabut asap di Bumi Batiwakkal sangat berpengaruh pada sistem kesehatan manusia. Sehingga masyarakat khususnya pelajar tetap gunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

Pihaknya juga sangat mendukung apabila metode belajar dilakukan jarak jauh, apabila ke depan jika kabut asap makin pekat. “Atau belajar ewat zoom, sebab kita harus waspada ispa itu sangat bahaya. Karena kemarin saya perhatikan juga kabut di Berau pekat sekali,” pungkasnya. (adv/and)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong



Anggota Komisi I DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo.

Sujarwo Ingatkan Pemkab Berau Cari Potensi Lain untuk Penyumbang PAD

TANJUNG REDEB - Pemkab Berau kembali diingatkan agar tidak tertumpu pada sektor bagi hasil bumi, seperti pertambangan batu bara, dengan mencari asupan baru pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber potensial lainnya. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo.

Dia menyampaikan, Kabupaten Berau memiliki sumber penghasilan yang sangat besar dari banyak sektor. Seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Terutama batu bara yang hingga kini tak tergantikan.

"Tetapi kita tahu, batu bara ini suatu saat akan habis. Tidak dapat dibarukan lagi. Jadi kita perlu safety sebelum habis," ucapnya.

Lanjut Sujarwo, jika keuangan

daerah hanya mengandalkan emas hitam sebagai sumber pendapatan terbesar daerah akan timpang ketika sektor tersebut habis. Belum lagi, harga komoditas batu bara juga fluktuatif tergantung harga pasar dunia.

Seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau turun drastis akibat sentimen harga pasar batu bara. Karena sekira 60 persen keuangan Berau mengandalkan dana perimbangan dari sektor tersebut.

"Jadi harus ada persiapan alternatif pengganti tambang. PAD harus ditingkatkan untuk penguatan fondasi menyongsong pembangunan jika batu bara tidak lagi bisa diandalkan," paparnya.

Kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi eksekutor membuka keran-keran

pendapatan daerah dari sektor potensial yang digadag-gadag mampu menggantikan penambangan emas hitam.

"Perhatikan celah mana kita bisa masuk. Penentu program ada di RP-JMD, dan pemerintah yang tahu persisnya. Saya yakin, jika kita serius mengembangkan sektor unggulan, bisa meningkatkan PAD dan melepas ketergantungan dari batu bara," sebutnya.

Dia berharap, kegiatan setiap tahun tidak hanya terfokus pada kegiatan rutin dan formalitas. Tetapi bisa menghitung nilai tukar dalam pengembangan satu program.

"Ada target, ada angka. Sudah cukup itu. Jadi anggaran tidak keluar percuma. Pelaku atau pengembang sektor juga harus diperhatikan kesajahteraannya," tutupnya. (adv/and)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

Sakirman Dorong Kembali Pembangunan Jembatan Kelay III

TANJUNG REDEB - Dengan dibukanya secara total Jembatan Sambaliung dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman kembali menormalkan aktivitas masyarakat di Sambaliung dan pesisir selatan Bumi Batiwakkal.

Dia mengatakan, meski Jembatan Sambaliung telah selesai dilakukan perbaikan, pemerintah harus kembali memikirkan pembangunan Jembatan Kelay III. Palsanya, masyarakat juga menantikan jembatan tersebut.

“Kita terimakasih dengan Pemprov Kaltim karena telah melakukan perbaikan Jembatan Sambaliung. Namun, agar jembatan tersebut dapat terpelihara, sebaiknya ada Jembatan

Kelay III sebagai alternatif lain,” ungkapnya.

Menurutnya, jika Jembatan Kelay III terealisasi, maka dapat menjadi pemecah arus kendaraan yang melintas di Jembatan Sambaliung.

“Jadi Jembatan Sambaliung bisa lebih terpelihara dengan pembatasan berat beban kendaraan yang melintas,” jelasnya.

Sakirman memaparkan, kendaraan roda dua dan empat bisa saja melintas di Jembatan Sambaliung, sedangkan kendaraan berat melalui Jembatan Kelay III. Hal itu agar beton Jembatan Sambaliung dapat lebih terpelihara.

“Jangan tunggu terjadi hal yang membutuhkan anggaran besar baru

memikirkan Jembatan Kelay III itu. Jadi Pemkab harus lebih aktif berkomunikasi dengan pihak terkait untuk membangun jembatan baru penghubung Singkuang-Limunjan tersebut,” ujarnya.

Kendati demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pemkab Berau untuk memikirkan Jembatan Kelay III itu sebagai alternatif lain menuju Sambaliung dan lima kecamatan di pesisir selatan kabupaten paling utara Kaltim ini.

“Jadi pekerjaan rumah juga terkait Jembatan Kelay III ini. Maka Pemkab harus mencari solusinya agar jembatan tersebut bisa terealisasi,” tandasnya. (adv/and)



Bupati KTT Ibrahim Ali, yakin pertumbuhan ekonomi melalui program KTT Berdaya direalisasikan.

Pertumbuhan Ekonomi KTT, Membaik Dua Tahun Terakhir

TANA TIDUNG - Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung, membaik dari kurun waktu 2021 sebesar 0,74 persen, alami kenaikan 5,03 persen pada tahun 2022.

Pasalnya, kenaikan ekonomi itu digolongkan dengan keberhasilan pada program pemerintah yang dikemas dalam KTT Berdaya. Bupati KTT Ibrahim Ali, saat dikonfirmasi menjelaskan, indikator keberhasilan program tersebut yaitu adanya pertumbuhan ekonomi lokal tiap tahunnya.

"Program KTT berdaya, merupakan program peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis lokal," ujar Ibrahim Ali, belum lama ini.

Indikator keberhasilan ini, diukur dengan pertumbuhan ekonomi tahunan. Selain itu, beberapa capaian pemerintah daerah dalam menerapkan

kan program KTT Berdaya, berupa kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menjual produknya.

"Pemasaran produk UMKM bisa disalurkan lewat aplikasi, Jaga TakaTaka. Yang merupakan aplikasi UMKM untuk perdagangan secara online," tuturnya.

Masih dalam program KTT berdaya, realisasinya berupa terbangunnya kawasan pertanian terpadu pada tiga desa, yaitu Desa Tideng Pale, Sambungan dan Kujau. Kemudian, adanya peningkatan pelaku UMKM dari 1.085, pada tahun 2020, meningkat 1.335 per maret 2023.

"Kami melakukan beragam strategi dalam meningkatkan pelaku usaha. Berupa pelatihan wirausaha muda, kegiatan integrasi database

UKM lokal interaktif, dan kegiatan pertanian terpadu," katanya.

Disamping itu, ada kegiatan pemberian bantuan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kreatif, termasuk pembangunan balai benih ikan yang terintegrasi serta ramah lingkungan.

"Termasuk pembangunan ekonomi terpadu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi," ungkapnya.

Selain itu, juga pembangunan perkebunan plasma kelapa sawit yang moderen, serta penguatan investasi industri sarang burung walet. **(tin/and)**



Petugas fogging saat menyemprotkan asap pada beberapa kawasan padat pemukiman.

Antisipasi DBD, Proses Fogging Dilakukan Secara Selektif

TANJUNG SELOR - Masyarakat Bulungan diminta perhatikan aspek kebersihan lingkungan. Sehingga, bisa terbebas dari beragam ancaman penyakit, salah satunya jenis penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Penularan jenis penyakit ini, bisa melalui jentik, nyamuk terutama pada lingkungan yang lembab dan kotor. Sebagai bentuk antisipasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan optimalkan pemberantasan jentik dan nyamuk melalui proses fogging.

Fogging dilakukan, pada beberapa titik yang padat penduduk. Termasuk pada areal yang rawan berkembang nyamuk karena kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Proses fogging biasanya dilakukan atas permintaan warga atau inisiatif pemerintah.

Beberapa titik ruas jalan dilakukan fogging, seperti Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Jeruk dan beberapa titik yang lain. Hanya saja, untuk penyakit jenis itu masih bisa terkendali di Kabupaten Bulungan.

“DBD masih terkendali, tidak ada

peningkatan kasus yg signifikan, pada September DBD ditemukan 1 di kecamatan Tanjung Palas Utara, 1 kasus di Tanjung Selor, 3 kasus di Peso Hilir, 1 kecamatan Tanjung Palas,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bulungan, Rustam, Selasa (3/10/2023).

Sejauh ini, kata dia proses fogging jarang digunakan. Kecuali ada kasus penularan setempat dilokasi yang sama, dan berdasarkan hasil survey jentik dinyatakan positif daerah tersebut terdapat jentik aedes.

“Kita selektif melaksanakan fogging, selain untuk mengurangi bahaya terhirup asap fogging, juga untuk menghindari resistensi nyamuk terhadap racun fogging,” tuturnya.

Proses fogging dilakukan dengan sosialisasi terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan Bulungan. Hal itu dilakukan, untuk memastikan kesehatan masyarakat aman dari beragam jenis penyakit.

Upaya itu dirasa sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran pen-

yakit demam berdarah. Salah satu warga jalan Salak, Kristina menyampaikan proses fogging mestinya rutin dilakukan. Apalagi pada saat musim hujan yang tidak menentu.

“Selain itu, kami berharap drainase jalan itu diperlebar dan diperdalam. Sehingga, saluran airnya berjalan tidak tersendat, karena genangan air itu berpotensi dijadikan sebagai sarang nyamuk untuk bertelur,” katanya.

Sementara, seorang petugas fogging yang namanya enggan disebutkan, berujar, beberapa kendala yang ditemukan saat dilakukan proses fogging. Pertama, masyarakat belum begitu sadar atas pentingnya proses fogging di lingkungan mereka. Sehingga, kadang kalau dilakukan fogging beberapa warga menolak, karena takut asap.

“Tapi, begitu dijelaskan mereka akhirnya sadar. Artinya, hanya perlu komunikasi saja, sehingga tidak menimbulkan mis komunikasi,” tuturnya. (tin/and)



Beberapa stiker yang dicantumkan pada kendaraan umum, isinya bernuansa kampanye padahal belum memasuki tahapan kampanye.

Dinilai Tidak Mengantongi Izin, Reklamasi Bernuansa Kampanye Bakal Ditertibkan

TANJUNG SELOR – Spanduk, baliho, reklame yang terpampang pada sejumlah ruas jalan Poros di Kabupaten Bulungan, nampaknya tidak semua mengantongi izin.

Beberapa spanduk yang mayoritas terpasang, bernuansa kampanye. Hal itu terlihat dari isi spanduk yang bertuliskan kata ajakan untuk memilih, foto bakal pasangan calon, visi-misi dan simbol jari.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Bulungan, Imam Hidayat menuturkan beberapa reklame yang terpasang itu sebagian diantaranya tidak membayar pajak.

“Kalau dilihat itu kebanyakan reklame iklan politik. Tapi, mereka

tidak pernah mengurus izin dan tidak membayar pajak,” ujarnya, kepada media ini, Rabu (3/10/2023).

Pihaknya berharap, peserta pemilu atau partai politik maupun bakal calon bisa tertib, danikuti aturan main dalam perhelatan pesta demokrasi. Karena, saat ini sepengetahuannya belum memasuki tahapan kampanye.

Apalagi, kalau berdasarkan pada PKPU 15 tahun 2023, tahapan kampanye itu baru dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024.

“Kalau sudah memasuki masa kampanye, reklame itu tidak dikenakan pajak. Tetapi, kalau belum masuk masa kampanye wajib membayar pajak,” tuturnya.

Adapun, untuk besaran pajak, disesuaikan dengan ukuran reklame dan tempat pemasangan. Artinya, ada

beberapa indikator untuk menentukan tarif tersebut. Pihaknya, akui telah berkoordinasi dengan Satpol PP terkait hal tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Bulungan, Hendrik Chairi mengaku akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulungan sebelum melakukan penindakan.

Termasuk, nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kita akan kolaborasi dengan OPD terkait dalam urusan penindakan. Seperti dari Bawaslu maupun DP-MPTSP,” pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Pegawai BPBD dengan orangtua korban, sepakat pencarian dihentikan.

Pencarian Korban Diduga Tenggelam di Sabanar Lama Dihentikan

TANJUNG SELOR - Pencarian terhadap Muhammad Reval, korban yang diduga tenggelam di Sabanar Baru, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan. Statusnya dihentikan, dengan hasil nihil.

Hal tersebut, berdasarkan pada informasi yang disiarkan langsung melalui media sosial, BPBD Bulungan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, BPBD Bulungan menyampaikan ke bapak Bahri, ayah dari Korban yang di duga tenggelam atas nama Reval. Bahwa, operasi pencarian dari tanggal 30 September hingga Selasa 3 Oktober 2023 telah selesai dan kami nyatakan ditutup dengan hasil nihil,” dikutip dari akun media sosial BPBD Bulungan.

Diwartakan sebelumnya, seorang anak Muhammad Reval berusia 11 tahun, dikabarkan hilang, dan diduga tenggelam di Sungai Kayan.

Dugaan itu, dikuatkan dengan beberapa bukti dan keterangan saksi

yang berhasil disimpulkan. Korban dikabarkan hilang pada Rabu 27 September 2023, sekitar pukul 17.00 wita. Dua hari setelah itu, pihak keluarga baru melaporkan soal kehilangan anak tersebut, karena tidak kunjung pulang ke rumah.

Almarhum biasa berenang di Pinggir Sungai Kayan, Sabanar Baru. Berdasarkan keterangan warga sekitar, mereka melihat Reval duduk di pinggir siring sungai.

Sebelum berenang, dia menitipkan wayang mainannya ke salah satu rumah warga, dan menyampaikan hendak berenang, setelahnya tidak ada kabar.

“Dua hari setelahnya, orangtua korban baru mencari tahu keberadaan korban, karena tidak kunjung pulang,” keterangan dikutip dari rilis resmi BPBD Bulungan.

Orangtua korban beranggapan, jika Reval tidur di rumah neneknya. Karena memang, keseharian Almarhum

jarang pulang ke rumah.

Dugaan almarhum tenggelam di sungai kayan makin kuat, setelah ditemukan sehelai pakaian di titik almarhum duduk. Kemudian, wayang yang dititipkan ke rumah warga belum diambilnya. Tim gabungan dibawa koordinasi BPBD Bulungan, telah mengerahkan personil untuk mencari jasad korban.

“Tetapi hingga Rabu 3 Oktober 2023, jasad korban belum ditemukan. Sehingga status pencarian dihentikan,” ujar salah satu petugas pencarian, yang namanya enggan diwartakan.

Pencarian sebelumnya dengan memanfaatkan perahu protiline dua buah, speedboat, perahu ketinting, dan alat pendukung pencarian tradisional. (tin/and)

Editor: Andhika



Alat Peraga Sosialisasi (APS) di persimpangan Telur Pecah, Tanjung Selor Bulungan.

Tolok Ukur Penindakan APS, PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye

TANJUNGSOLOR - Bawaslu Kaltara akan melakukan pemetaan terhadap banyaknya Alat Peraga Sosialisasi (APS), yang terpampang pada beberapa titik lokasi di Kaltara.

Dari pemetaan tersebut, jika kemudian melanggar dan mengandung unsur ajakan dan atau mengungkapkan citra diri, ciri ciri khusus atau karakteristik parpol peserta pemilu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 15 tahun 2023.

“Ketentuan tersebut, merupakan tolok ukur untuk menilai apakah sosialisasi yang dilaksanakan melanggar atau tidak,” ujar pimpinan Bawaslu Kaltara, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Fadliansyah belum lama ini.

Terhadap kondisi tersebut, Bawaslu Kaltara melakukan pemetaan. Selanjutnya, menerbitkan surat imbauan kepada partai politik (parpol) yang bakal calon legislatif (bacaleg) dinilai melanggar aturan sosialisasi.

Selanjutnya, Bawaslu Kaltara telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan kordinasi kepada pihak terkait untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi tersebut.

“Mengenai penertiban APS yang belum dilaksanakan oleh Bawaslu

kaltara, karena kita berupaya memaksimalkan pencegahan dengan melakukan imbauan dan koordinasi dengan parpol, agar terhadap APS bacaleg yang melanggar aturan sosialisasi tersebut diturunkan sendiri,” tuturnya.

Bawaslu menilai, jika bacaleg atau parpol belum mengindahkan apa yang menjadi atensi dari Bawaslu, maka dimungkinkan dalam waktu dekat akan dilakukan penindakan secara serentak. “Terkait upaya penindakan, berupa penertiban APS bacaleg dalam waktu dekat akan kami lakukan secara serentak,” jelasnya.

Imbauan yang dilyangkan oleh

Bawaslu, sifatnya hanya satu kali. “Selanjutnya kami lakukan kordinasi dengan parpol peserta pemilu,” katanya.

Bawaslu Kabupaten dan Kota di Kaltara, diberikan waktu untuk melakukan sosialisasi itu. Nantinya, setelah dilakukan rapat koordinasi (rakor) dengan partai politik tapi alat sosialisasi itu belum diturunkan maka Bawaslu akan menindak.

“Setelah rakor dengan parpol, akan kami tertibkan. Jika parpol tidak menertibkan sendiri alat peraga sosialisasi bacalegnya yang dinilai melanggar aturan sosialisasi,” tandasnya. (tin/and)





Harga Beras di Kota Tarakan Naik karena El Nino

TARAKAN - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) buka suara mengenai harga beras yang terus mengalami kenaikan di Kota Tarakan. Menurut mereka, kenaikan ini terjadi disebabkan oleh fenomena El Nino.

"Akibat dari El Nino sehingga banyak petani kita yang mengalami gagal panen. Dan inipun tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga global," ucap Pelaksana Harian (Plh) DKPP Tarakan, Husna Ersant Dirgantara kepada *Mediakaltimara.com*, Selasa (3/10/2023).

Husna menyebut, banyak daerah terutama produsen beras di Indonesia mengalami dampak dari El Nino. Salah satunya Sulawesi dan Jawa. "El Nino sebabkan musim kemarau yang ekstrem sehingga banyak gagal panen. Seperti di Jawa kemarau ada yang tiga bulan gak hujan itu bisa gagal panen," kata Husna.

Untuk Kota Tarakan, kebutuhan beras masih sangat bergantung pada Sulawesi dan Jawa. Dia mengungkapkan

kan 99 persen kebutuhan beras masyarakat Kota Tarakan ditopang oleh dua daerah tersebut. Hal itu terjadi karena Tarakan merupakan wilayah kepulauan sehingga luasan lahan sawah masih sangat kecil.

"Luasan lahan sawah yang sangat kecil cuman 12,4 hektar. Jadi hampir 99 persen didatangkan dari luar. Luasan lahan kita memang kecil. Untuk tanah cocok aja tapi dari segi luasan memang kecil," lanjutnya.

Husna mengatakan, dari pantauan pihaknya harga rata-rata beras medium di Kota Tarakan Rp 16 ribu. Harga tersebut mengalami kenaikan Rp 4 ribu jika dibandingkan pada dua bulan lalu yang harganya masih Rp 12 ribu.

Saat disinggung mengenai stok beras di Kota Tarakan, dia memastikan bahwa ketersediaan stok relatif aman. Kata Husna, berdasarkan laporan neraca mingguan komoditas pangan DKPP, stok beras di Kota Tarakan sebanyak 1619,5 ton sementara kebutuhan 1215,70 ton.

"Jadi kita ada neraca pangan memantau secara berkala setiap seminggu, berapa stok dan kebutuhan kita. Ketika ada warning kita cepat-cepat datangkan dari luar," ungkapnya.

Untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan stok beras di Kota Tarakan aman, DKPP melakukan berbagai upaya. Pertama, memantau ketersediaan stok secara berkala.

Menurutnya, hal ini penting sebab ketika ada indikasi terjadi peningkatan kebutuhan maka akan dilaporkan ke Perum Bulog agar segera mendatangkan stok beras.

Upaya selanjutnya, mengadakan pasar murah bekerjasama dengan Bulog dan Bank Indonesia. Pasar murah ini dilakukan satu bulan sekali. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Kepala BMKG Kota Tarakan, M Sulam Khilmi saat menunjukkan titik lokasi asap.

ADE/MKR

Begini Penjelasan BMKG Soal Fenomena Kabut Asap di Tarakan

TARAKAN - Wilayah Kalimantan Utara, tak terkecuali Kota Tarakan belakangan ini menghadapi fenomena kabut asap. Tak ayal, kondisi ini mengganggu jarak pandang dan memperburuk udara di Tarakan.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan, M Sulam Khilmi menjelaskan, fenomena kabut asap terjadi karena angin membawa partikel asap dari wilayah yang mengalami kebakaran hutan. Wilayah yang mengalami kebakaran hutan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

"Beberapa hari ini mulai Minggu sampai Selasa, memang ada fenomena kabut asap. Kebetulan anginnya mengarah ke Kaltara membawa partikel asap," ungkapnya kepada *Mediakaltimtar.com*, Selasa

(3/10/2023).

Khilmi menyampaikan bahwa, berdasarkan pantauan 24 jam terakhir BMKG, hanya ada satu titik panas atau hotspot di wilayah Kaltara yang berada di Tanjung Palas Timur. Namun masih berada pada level medium sekitar 30-80 persen. Dijelaskannya, hotspot merupakan titik panas yang menunjukkan bahwa ada daerah yang lebih panas dari wilayah sekitarnya.

"Kalau level di atas 80 persen itu hampir bisa dipastikan ada kebakarannya. Tapi kalau di bawah 80 persen menunjukkan bahwa titik tersebut lebih panas dari wilayah sekitarnya," kata dia.

Kendati demikian, dia menyebut sampai dengan saat ini level kualitas udara di Kaltara masih aman. Kata dia, penentuan status darurat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sementara

BMKG hanya bertugas memberikan informasi prakiraan cuaca.

Hanya saja, fenomena kabut asap ini mengakibatkan penurunan jarak pandang dari yang mulanya 10 km menjadi 4 km. "Ini dampak dari asap, hari ini Kaltara masih tahap belum membahayakan dan masih bisa digunakan untuk aktivitas penerbangan," lanjutnya.

Khilmi menyebut, kejadian seperti ini pernah terjadi pada 2015 dan 2019 silam. Bahkan kondisinya lebih parah. Saat itu jarak pandang di bawah 5 km. "Pada saat itu titik panasnya ada di Tanjung Palas Utara Timur, Malinau dan Sesayap. Makanya waktu itu mempengaruhi kualitas udara," tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



ADE/MKR

Petugas saat berusaha memadamkan api.

Dua Hektare Lahan di Jalan Amal Lama Tarakan Terbakar, Diduga Akibat Kelalaian Manusia

TARAKAN - Kebakaran lahan terjadi di Jalan Amal Lama, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Selasa (3/10/2023) malam. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga Tarakan karena lokasi kebakaran lahan tak jauh dari Universitas Borneo Tarakan.

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan, Ridwanto Suma melalui Edy S, polisi hutan UPT KPH Tarakan menjelaskan, informasi mengenai adanya kebakaran lahan didapatkan dari Kapolsek Tarakan timur sekira Pukul 20.15 Wita.

"Informasi ada kebakaran di Kelurahan Pantai Amal. Jadi kami kumpulkan tim, lalu informasikan ke BPBD selanjutnya tim turun ke lapangan," ucapnya saat ditemui di lokasi kejadian kebakaran, Selasa (3/10/2023).

Dia memperkirakan luas lahan terbakar sekitar dua hektar. Lahan yang terbakar ini, kata Edy, merupakan milik warga. "Kami belum tahu pasti karena malam. Tapi kemungkinan 2 hektar lebih," katanya.

Edy menyebut melihat situasi yang ada, menurutnya, penyebab keba-

karan terjadi karena kelalaian manusia.

"Kesengajaan orang bakar lahan atau buang puntung rokok terlebih cuaca cukup kering. Kalau dari alam enggak karena batu baranya gak ada sama sekali," ungkapnya.

Untuk proses pemadaman api, lanjut Edy, membutuhkan waktu sekitar dua jam. Dia pun menghimbau kepada warga Tarakan untuk tidak

melakukan pembakaran lahan terutama untuk membuka kebun.

"Karena cuaca cukup kering. Sekarang kita terima kiriman asap juga dari Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Jadi janganlah ada aktivitas bakar buka lahan karena memicu terjadi kebakaran lahan," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika





Pihak UPT Laboratorium DLH Tarakan saat melakukan uji kualitas udara.

ADE/MKR

DLH Uji Kualitas Udara di Tarakan, Hasilnya Keluar Hari Ini

TARAKAN - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan melakukan uji kualitas udara buntut terjadinya kabut asap. Uji kualitas udara dilakukan di Halaman Kantor DLH Selasa, (3/10/2023) menggunakan alat High Volume Air Sampler (HVAS) dan Total Suspended Particulate (TSP). Kedua alat itu digunakan untuk menyaring debu dan partikel di udara.

UPT Laboratorium DLH Tarakan, Supran Anang menjelaskan, tingkat error dari alat tersebut diperkirakan 0,5. Sementara untuk proses uji, setelah 24 jam kertas saring yang

telah di tempel partikel-partikel dan debu akan ditimbang dan di hitung sesuai dengan rumus.

“Prinsipnya menggunakan pompa jadi kita harus memantau seberapa besar laju alirnya. Jika lebih dari 0,6 atau 0,7 kita harus pantau berada di range (jangkauan),” ucapnya kepada media di Tarakan, Selasa (3/10/2023).

Supran mengatakan uji pengukuran kualitas udara ambien membutuhkan waktu selama 24 jam. Itu artinya, hasil akan keluar pada Rabu (4/10/2023) siang sekira Pukul 14.00 Wita.

Dia menyebut menguji kualitas udara merupakan tugas dari DLH. Terlebih, saat ini Tarakan sedang

mengalami kabut asap.” Tugas kami untuk mengecek (kualitas udara) kalau untuk dari mana asalnya itu dari bidang pencemaran,” katanya.

Pengukuran kualitas udara ini, lanjut Supran, tidak hanya dilakukan DLH saat terjadi kabut. Kata Supran, pengukuran kualitas udara dilakukan per semester atau per 6 bulan sekali. “Terakhir kali melakukan uji kualitas udara, menunjukkan bahwa Tarakan memiliki udara yang bagus mencapai 96,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetyi

Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



RUU ASN DISAHKAN

**SOLUSI UNTUK PENUHI
130 RIBU FORMASI ASN
DI DAERAH 3T**

BACA HALAMAN 2-3



**TOK! DPR SETUJUI
REVISI UU IKN,
SIMAK 7 POIN PENTING
PERUBAHANNYA
BACA HALAMAN 29**



Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (03/10).

RUU ASN Disahkan

Solusi untuk Penuhi 130 Ribu Formasi ASN di Daerah 3T

JAKARTA - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (3/9), secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang, membuka jalan bagi transformasi besar-besaran dalam sistem kepegawaian nasional.

Salah satunya meningkatkan mobilitas talenta ASN dan mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini terpusat di daerah tertentu, khususnya di Pulau Jawa.

"Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini sebagian masih terpusat di kota-kota besar saja. Mobilitas talenta akan berorientasi

'Indonesia-Sentris' sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (03/10).

Menteri Anas menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi di daerah 3T. Sebab kurangnya ketertarikan calon ASN untuk mengisi formasi di daerah-daerah tersebut. UU ini menjadi solusi agar daerah 3T juga mendapat pelayanan dengan baik.

“Salah satunya nanti di PP, pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T,” jelas Menteri Anas.

Anas menambahkan, salah satu poin krusial lain dalam RUU ASN yaitu rekrutmen ASN yang ditransformasikan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Sehingga ketika negara memiliki beberapa sektor prioritas, seperti kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN harus diarahkan ke instansi-instansi yang menjadi leading sector terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut.

“Yang berlaku selama ini, rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai bisnis proses saat ini. Padahal disaat yang sama kita sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional menjadi belum sepenuhnya selaras,” papar Anas.

Anas menyampaikan bahwa mobilitas talenta untuk ASN bertugas di luar instansi pemerintah seperti TNI/Polri dan BUMN juga mulai terbuka dengan resminya UU ini. ASN dapat didorong untuk bergerak antar-instansi untuk pengembangan kompetensinya.

Selama ini, jelas Anas, persyaratan untuk melakukan mutasi sangat kaku, sehingga muncul stigma bahwa sulit memindahkan seorang ASN.

“Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota

lembaga non-struktural, maupun dalam penugasan ke organisasi dunia, tidak kehilangan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut,” papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

UU anyar ini, papar Anas, juga mendukung percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan sebagai suatu kewajiban bagi ASN. “Untuk itu, Instansi Pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi Pegawai ASN,” tegas Anas.

Pola pengembangan kompetensi pun tidak lagi klasikal, seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning, seperti magang dan on the job training. “Seluruh konsep itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional,” jelas Anas. (MK)

Editor: Agus Susanto





PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya

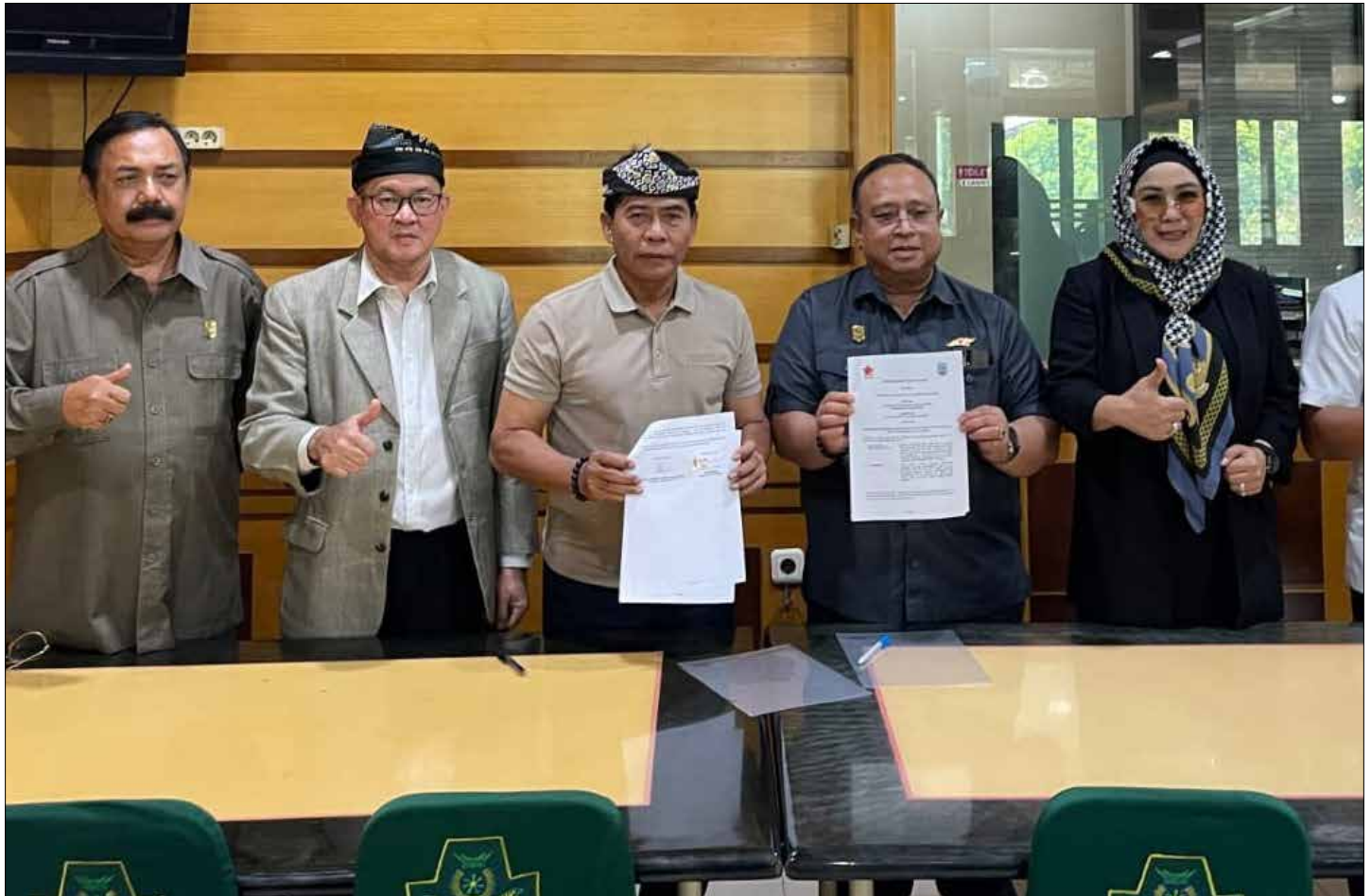


Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



KERJASAMA : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum bekerjasama dengan Asprindo untuk pemberdayaan ekonomi di Kaltara.

Pemprov Teken MoU dengan Asprindo untuk Pemberdayaan SDM, Energi, Pertambangan, dan UMKM

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Bumi Putera Nusantara Indonesia (Asprindo).

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, menandatangani MoU yang disaksikan oleh pengusaha asal Negeri Jiran Malaysia, serta jajaran

Asprindo pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asprindo Kaltara.

Diharapkan, langkah ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kaltara.

"Semoga langkah ini membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltara," kata Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Diketahui, kesepakatan ini berfokus pada program pemberdayaan

Sumber Daya Manusia (SDM), energi, pertambangan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini turut menandai kerja sama yang kuat antara Pemprov dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM, serta mendukung sektor energi, pertambangan, dan UMKM di wilayah Kaltara.

Bahkan, kedua belah pihak akan segera menindaklanjuti penyelesaian administrasi secara teknis untuk mempercepat realisasinya. (**dkisp**)



ASPRINDO : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menjadi narasumber Seminar Ekonomi di Munas Asprindo di Jakarta, Sabtu (30/9).

Gubernur Dorong Pembentukan Desa Industri di Kaltara

JAKARTA- Salah satu program dari Asperindo adalah membangun desa atau kampung industri. Menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, hal ini sangat positif karena setiap provinsi dapat memiliki desa industri yang berfokus pada sektor tertentu.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara saat menjadi narasumber pada Seminar Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) 2023 di Hotel Millennium Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Seminar ini mengusung tema "Penguatan Peran Pengusaha Pribumi dalam Ekosistem Usaha Nasional" dan dihadiri oleh 33 perwakilan dari 38 provinsi.

Menjadi narasumber, Gubernur Kaltara membahas peran Asperindo dalam sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam perekonomian dan

pembangunan regional di Indonesia.

"Misalnya, industri motor listrik atau sepeda listrik dapat dibangun di satu provinsi, sementara provinsi tetangga dapat fokus pada pembuatan aki, dan provinsi lainnya mungkin memproduksi komponen seperti kerangka atau rantai. Ini dapat berkontribusi signifikan dalam memajukan ekonomi masyarakat di provinsi yang sedang dibina," ucap Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.

Zainal Paliwang mengungkapkan keinginannya dalam waktu dekat bersama Asperindo untuk membuat satu pilot project di salah satu desa di Kaltara untuk membangun desa industri.

"Kita dapat berkolaborasi dengan perusahaan yang telah beroperasi dengan bantuan dari Asperindo, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Tujuannya adalah untuk merancang upaya-upaya yang akan kita lakukan

sehingga di setiap provinsi dapat dibentuk profil proyek satu desa sebagai desa industri," ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam acara Munas Asprindo tahun 2023, Gubernur didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, SE., M.Si.

Even lima tahunan tersebut dibuka oleh Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, BBA., MBA, dan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 29 hingga 30 September 2023.

Selain Gubernur Kaltara, hadir juga narasumber lainnya seperti Dr. Rizal Ramli (Ketua Dewan Pembina Asprindo), Prof. Dr. Didin S. Damahuri, dan Jend. TNI (Purn) Fachrul Razy.

Setelah seminar, Gubernur Zainal mengunjungi gerai pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta berbelanja beberapa produk unggulan yang dijajakan dari berbagai daerah di Indonesia. **(dkisp)**



ISTANA BERBATIK: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum bersama Ketua TP PKK Kaltara, Hj Rachmawati Zainal, SH mengitari catwalk di halaman Istana Merdeka Jakarta, Ahad (1/10) lalu.

Batik Khas Kaltara Meramaikan “Istana Berbatik”

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang didampingi sang Istri yang juga Ketua TP PKK Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, SH., berjalan bergandengan di catwalk depan Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (1/10).

Pasangan tersebut tampil kompak bernuansa kearifan lokal dengan mengenakan pakaian batik disandingkan aksesoris berupa singal, kalung manik-manik dihiasi dengan taring besar dan tas rotan khas Bumi Benuanta.

Ini merupakan event “Istana Berbatik” yang digelar dalam rangka dalam memperingati Hari Batik Nasional tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden

Ma’ruf Amin didampingi istri Wury Estu Handayani.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia serta aktif melestarikan dan mengembangkannya,” ujar Presiden yang tampil mengenakan batik bermotif Parang Barong Seling Kembang Udang Iris didominasi warna coklat.

Presiden menambahkan, dengan ditetapkan 2 Oktober sebagai perayaan Hari Batik Nasional, Presiden menyebut bangsa Indonesia perlu

bersyukur karena memiliki batik yang telah dikenal dunia sebagai identitas bangsa.

“Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa, tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia,” jelasnya.

Peragaan busana ini melibatkan tak kurang dari 500 peserta yang antara lain, terdiri dari pimpinan lembaga negara, anggota Kabinet Indonesia Maju, perwakilan badan usaha milik negara (BUMN), gubernur, tokoh publik, atlet, model, perwakilan kerajaan-kerajaan nusantara, hingga duta besar negara-negara sahabat. (dkisp)



P3PD : Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka Konsolidasi Pelaksanaan P3PD di Hotel Pangeran Khar, Senin (2/10).

Perkuat Kelembagaan Desa melalui P3PD

TANJUNGSOLOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara (Kesra) Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Pangeran Khar, Senin (2/10).

Rapat yang digelar secara virtual itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara, Edy Suharto, Plt. Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, dan wakil Kepala Sekretariat P3PD, Kemendagri, Jose Rizal S.IP., M.Si.

“Kami sampaikan bahwa pelak-

sanaan P3PD sejalan dengan RP-JMD dari tahun 2020 sampai tahun 2024, pada agenda pembangunan sesuai untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro mengungkapkan terdapat 3 komponen dalam pelaksanaan P3PD. Komponen satu Kementerian Dalam Negeri terkait penguatan kelembagaan pemerintah desa.

Komponen kedua Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas mendorong pembangunan desa partisipatif.

Komponen tiga terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Ma-

nusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bappenas terkait koordinasi pemantauan dan supervisi nasional karena sumber dana berasal dari Bank Dunia.

Menurut Datu Iqro, pelaksanaan P3PD harus tepat sasaran. Yaitu tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi.

Kemudian tersedianya dukungan pembelajaran berbasis teknologi digital di lokasi prioritas. Serta, terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil. **(dkisp)**



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kantor Kelurahan Loa Ipuh.

Tak Lagi Representatif, Kantor Kelurahan Loa Ipuh akan Dibangun Ulang

TENGGARONG - Tidak lagi representatif, kantor Kelurahan Loa Ipuh, yang berada di Jalan Mangkuraja, Tenggarong akan segera dibangun ulang, namun dengan lokasi yang berbeda. Rencana pemindahan ini pun sudah dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara (DPU Kukar). Dan tindak lanjut dengan pematangan proposal pembangunannya.

Lokasinya pun tidak jauh dari kantor induk yang ada sekarang. Tepatnya di Jalan Penyinggahan, berlokasi di lapangan tembak dekat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDDI).

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, menyebut bahwa kantor kelurahan yang ada perlu rehabilitasi berat. Ter-

lebih lokasi kantor Kelurahan Loa Ipuh yang sekarang berada di sepadan Sungai Mahakam yang masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH). Serta masuk dalam pemetaan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur (Kaltim).

"Jadi kami berpikir sekalian saja kita pindahkan itu. Nanti kedepannya terserah kepada pemerintah, mudah-mudahan (kantor Kelurahan Loa Ipuh yang sekarang) bisa dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain," ujar Erri.

Alasan lainnya, karena kantor yang ada saat ini sangat rentan banjir saat debit anak Sungai Mahakam sedang naik. Ditambah struktur dan kondisi bangunan kantor yang sudah ter-

makan usia.

Ia pun tidak berani menyampaikan berapa besaran anggaran yang digunakan untuk proses pembangunan kantor kelurahan Loa Ipuh yang rencananya dibangun 2024 mendatang. Menyerahkan kepada DPU Kukar yang memang lebih kompeten dalam melakukan perhitungannya.

"Kalau memang setahun bisa selesai Alhamdulillah kita bisa memfungsikan kantor yang baru itu. Target kita mudah-mudahan tahun depan bisa terbangun," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Puluhan atlet Shorinji Kempo Kukar yang akan berlaga di Shorinji Kempo World International Study Session, Jepang.

Sekcab Sunggono Lepas Atlet Shorinji Kempo Berlaga di Jepang

TENGGARONG - Sebanyak 33 atlet Shorinji Kempo asal Kutai Kartanegara (Kukar), dilepas untuk mengikuti Kejuaraan Shorinji Kempo World International Study Session pada Oktober 2023 ini. Sebanyak 33 atlet yang dilepas oleh Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Kukar, Sunggono, ini akan berlaga di Tokyo, Jepang.

Dalam agenda yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (3/10/2023) pagi ini, Sunggono pun menaruh rasa bangga kepada para atlet yang dikirim. Diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik, tentunya untuk kemajuan cabang olahraga Shorinji Kempo Kukar di kancah internasional.

"Kita berharap mereka bisa menjaga kekompakkan, kebersamaan dan membawa nama baik Kutai Kartanegara," kata Sunggono.

Momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya Kukar ke mancanegara khususnya di Jepang. Dan menjadi semangat baru dan menunjukkan kepada dunia bahwa Kutai Kartanegara dapat diperhitungkan. "Bagi atlet Shorinji

Kempo untuk bisa terus berprestasi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kutai Kartanegara dan Indonesia," sebutnya.

Dirinya juga berpesan bahwa dalam pertandingan, hasil menang atau kalah adalah hal biasa, yang penting bisa mendapat ilmu dan persaudaraan satu sama lain dan memproleh prestasi. Para tim Shorinji Kempo Kukar juga diingatkan untuk menjaga kesehatan, menjaga motivasi dan semangat serta fokus pada kejuaraan dan prestasi. "Insya Allah perjuangan tidak ada yang sia-sia," pesannya.

Sementara itu Ketua Umum Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Pengurus Kabupaten (Pengkab) Kukar, Ahmad Zulfiansyah, selain 33 atlet akan ada 6 pelatih serta manager dan official yang akan mendampingi di kejuaraan internasional ini.

Pihaknya menargetkan bisa meraih juara di semua nomor pertandingan. Minimal medali perak atau perunggu. Namun pihaknya lebih optimis di tingkatan kelas junior untuk meraih medali emas. Sebab

berdasarkan pengalaman untuk tingkatan junior pihaknya lebih banyak peluang dan lebih unggul, pesaing terberat hanya atlet asal Jepang.

"Untuk yang junior kita target emas," kata Zulfiansyah.

Dalam kejuaraan internasional ini pihaknya juga telah melakukan persiapan panjang dan terus berlatih, mulai dari keikutsertaan kejuaraan Prapon serta seleksi Popnas yang diikuti oleh para atlet.

"Hampir 6-8 bulan karena kita mempersiapkan dari event sebelumnya, sebelum melangkah ke kejuaraan dunia," lanjutnya.

Tim Shorinji Kempo Kukar di dalam kejuaraan internasional nantinya juga akan membawa misi mengenalkan budaya yang ada di Kutai Kartanegara. Di mana para atlet nanti akan tampil dihadapan para peserta dengan membawakan tarian khas Kutai dan Dayak. **(adv)**

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Antisipasi Tindak Perundungan, DP3A Kukar Sosialisasi ke Sekolah-sekolah

TENGGARONG-Viral di jagad maya kasus perundangan terhadap anak dibawah umur yang berujung pada kekerasan. Mirisnya, pelakunya pun masih di bawah umur yang notabene merupakan teman sekolah. Di Balikpapan misalnya, perundangan yang dilakukan di area masjid, berujung hingga ke ranah hukum.

Melihat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) pun mengambil sikap. Dengan melakukan langkah konkret berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan sepanjang September saja, su-

dah lima sekolah di lima kecamatan yang disambangi.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP2KH), Marhaini, sosialisasi memang sudah dilakukan. Masing-masing di SMAN 1 Kecamatan Muara Badak, SMAN 1 Kecamatan Merangkayu, SMAN 1 dan SMPN 1 Kecamatan Loa Janan, SMPN 1 Kecamatan Loa Kulu dan SMPN 1 Tenggaraong Seberang.

Tidak hanya itu, Bidang PHP2KH pun melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan pembimbingan pelatihan, dengan menyasar ke sekolah-sekolah.

"Alhamdulillah sudah lima kecamatan yang sudah kita laksanakan untuk sosialisasi. Itu salah satu pencegahan dari kasus bullying dan lain-lain," ujar Marhaini, Selasa (3/10/2023).

Untuk penanganan kasus perundangan yang mengarah kepada kekerasan, masih terbilang kecil di Kukar. Sempat terjadi pada tahun 2022, namun tidak sempat heboh dan cepat tertangani. Baik itu penanganan bagi korban, maupun bagi pelaku yang melakukan perundungan. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Kades Embalut, Yahya.

Pembangunan Jalan Desa Embalut Diguyur Rp 10 Miliar

TENGGARONG-Desa Embalut yang terletak di Kecamatan Tenggaraong Seberang, menjadi satu di antara desa yang mendapatkan suntikan dana pembangunan yang lumayan besar. Di mana pada tahun 2023 saja, sebanyak Rp 15 miliar yang dialokasikan untuk Desa Embalut.

Sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Embalut. Untuk jalan sepanjang 1,8 kilometer yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Untuk proses pembangunan jalan semenisasi menuju jalan poros Kecamatan Tenggaraong Seberang.

Pembangunan jalan pun diklaim

hampir rampung. Saat ini memasuki tahapan pengeringan semenisasi. Dan segera bisa dipakai oleh warganya. "Luar biasa di era Edi-Rendi ini. Alhamdulillah ini lagi pembangunan jalan semenisasi yang puluhan tahun kami tunggu-tunggu," ujar Kades Embalut, Yahya.

Dengan adanya jalan semenisasi yang sedang dikerjakan ini, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warganya. Mobilitas barang dan jasa pun menjadi lancar. Belum lagi bagi warganya yang ingin bekerja dan pergi ke sekolah kini menjadi lebih nyaman. Mengingat dulu ketika hujan turun, jalan sangat sulit dilintasi.

"Dulu kan kalau hujan susah (dilewati)," lanjutnya.

Tidak hanya kucuran dari APBD Kukar saja yang mengalir deras ke Desa Embalut. Tahun ini pun, sebanyak 14 bangunan kelas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tenggaraong Seberang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2023.

"Ini lagi hampir finishing, hampir selesai. Bangunan lokal untuk kegiatan belajar dan lab ada 14 lokal," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Sebanyak 77 RT di Kelurahan Loa Ipuh Bakal Dimekarkan

TENGGARONG - Pemekaran wilayah Kelurahan Loa Ipuh, hingga saat ini terus berprogres. Di mana sudah menyentuh angka 90 persen, Kelurahan Loa Ipuh disepakati akan dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing Kelurahan Loa Ipuh, Loa Ipuh Seberang dan Loa Ipuh Tengah.

Dijelaskan oleh Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, Loa Ipuh induk akan diisi Rukun Tetangga (RT) yang berada di kawasan Jalan Loa Ipuh. Kelurahan Loa Ipuh Seberang akan diisi bagian dari Jalan Gunung Belah sampai kawasan Jalan Kartini. Selanjutnya Kelurahan Loa Ipuh Tengah akan berbatasan dengan Kelurahan Mangkurawang, Maluhu dan Loa Ipuh Darat.

Untuk lokasi Kelurahan Loa Ipuh Tengah, dikatakan oleh Erri masih jadi kendala di penyiapan lahan untuk pembangunannya. Sarana dan prasarananya di daerah Kelurahan Loa Ipuh Tengah masih

terkendala lahan untuk bangunan persiapan kantor.

"Karena yang awalnya kita siapkan itu kemarin ternyata terbentur dengan HGU, itu yang jadi kendala dari pihak kelurahan," ungkap Erri.

Erri melanjutkan, sebanyak 77 RT yang akan dibagi menjadi 3 wilayah tadi. Namun berdasarkan data darinya, terbanyak nantinya RT akan berada Kelurahan Loa Ipuh Seberang.

Ia pun menyebut pemekaran Kelurahan Loa Ipuh akan dikerjakan secepatnya. Kini sedang mengejar berbagai persiapannya. Dengan harapan pada tahun 2025 mendatang sudah klir dan bisa dilakukan pemekaran. "Kita baru sampai pembahasan sapsarnya saja belum ke SDM. Kalau SDM kita serahkan kepada BKPSDM Kukar," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan

TOYOTA LET'S GO BUDIDAYA

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE
PALING HEMAT
GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusen Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

APBD Perubahan Berau Tinggi, Fraksi NasDem Harap Dirasakan Langsung oleh Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bonus kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2023 diharapkan Fraksi NasDem dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia mengatakan, dengan besarnya APBD perubahan Berau tahun 2023, pembangunan harus difokuskan kepada peningkatan infrastruktur di kampung-kampung yang ada, tentu harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemkab jangan terlalu terpusat pada pembangunan infrastruktur

yang belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, fokuslah pada apa yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat luas," ujarnya.

Darlena menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus lebih memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Baik itu di tingkat kampung, kelurahan maupun kecamatan.

"Karena apa yang menjadi aspirasi mereka, tentu itu apa yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, harus benar-benar diperhatikan atau diprioritaskan," katanya.

Dirinya menyebut, fraksi NasDem menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Berau tahun 2023 untuk disahkan menjadi Perda Berau tahun 2023. Namun ada catatan yang diberikan pihaknya mengenai hal tersebut.

"Semoga apa yang kami suarakan ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Berau, kami berharap pembangunan di Kabupaten Berau melalui APBD dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan seluruh masyarakat," pungkasnya. (adv/dez)

Ichsan Rapi Dorong Penuntasan Jalan Freeway

TANJUNG REDEB - Pembangunan jalan bebas hambatan atau freeway yang dibangun sejak 2014 lalu hingga saat ini belum tuntas. Hal itu disorot Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

Dia menerangkan, jika freeway itu telah tuntas, maka akan menghubungkan Bandara Kalimantan hingga ke kawasan Singkuang. "Tentu ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan pemecah arus lalu lintas di perkotaan," katanya.

Rencananya, jika jalur tanpa hambatan tersebut telah selesai, maka akan terhubung hingga ke wilayah Mantaritip, Kampung Pilanjau dan Sambaliung.

"Kalau Jembatan Kelay III terealisasi, maka akan menjadi penghubung Singkuang dan Limunjan. Jadi nanti itu jalannya hanya melintasi pinggiran kota, jadi tingkat kepadatan

kendaraan tidak terpusat ke perkotaan," jelasnya.

Selain itu, kata Ichsan, dengan adanya pembangunan jalan tersebut nantinya kendaraan bermuatan besar seperti truk sawit dan sebagainya tidak lagi diperbolehkan melintas di pusat kota. "Tidak ada lagi mobil-mobil besar yang melintas. Khususnya di pusat Tanjung Redeb," tegasnya.

Politikus Gerindra ini berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melanjutkan proyek yang sempat tertunda tersebut. Untuk itu, perlu adanya sinergisitas bersama masyarakat untuk melakukan pembebasan lahan. Guna, memperlancar pengerjaan ke depannya.

"Pemkab harus segera membebaskan lahan yang akan digunakan. Jangan sampai juga masyarakat mematok harga mahal untuk pembebasan lahan," tandasnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

Kabut Asap Melanda Berau, Ratna: Gunakan Masker saat Keluar Rumah

TANJUNG REDEB - Munculnya kabut asap akibat kemarau dan karhutla yang terjadi beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang. Diketahui, saat ini kabut asap mulai terlihat di wilayah perkotaan, sehingga memicu menurunnya jarak pandang.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya kesehatan masyarakat, terutama terhadap kesehatan pernafasan pada anak-anak dan lanjut usia. Ratna mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap kesehatan, dengan cara menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah.

"Lebih baik mencegah lebih dulu sebelum mengobati. Tidak ada salahnya kalau menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah, apalagi saat ini musim kemarau, selain kabut asap juga menghindari efek debu akibat kemarau," ujarnya.

Selain penggunaan masker, dirinya juga memberi saran untuk menggunakan pelindung tubuh lainnya saat



Suasana kabut asap yang mulai menyelimuti perkotaan Tanjung Redeb.

bepergian ke luar rumah, untuk menghindari efek negatif dari suhu panas yang melanda Kabupaten Berau.

Tidak hanya mengimbau penggunaan masker saat bepergian ke luar rumah, Politikus Golkar ini juga berharap kabut asap yang menyelimuti langit Kabupaten Berau bisa segera menghilang melalui penanggulan-

gan karhutla yang terus dilakukan pihak terkait.

"Dampak dari kabut asap dan suhu panas saat ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan, kalau bisa kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Semoga kabut asap ini segera menghilang sepenuhnya," tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Syarifatul: Perhatikan Dua Kesultanan yang Ada untuk Kesejahteraannya

TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau memiliki dua kesultanan, yakni Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Legislatif pun mendorong pemerintah untuk memperhatikan keduanya agar kesejahteraan tetap terjaga.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, dua kesultanan tersebut hingga kini menjadi kebudayaan yang melekat bagi Kabupaten Berau. Sehingga Pemkab Berau harus senantiasa memberikan dukungan berupa kesejahteraan.

"Contohnya, memberikan insentif khusus bagi penunjang operasional dan kehidupan keduanya," ucapnya.

Selain itu, Syarifatul memberikan apresiasi kepada Pemkab Berau yang telah meningkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) dengan dibangunnya gapura di Keraton Sambaliung.

Dirinya menyarankan, selain gapura yang ditingkatkan. Drainase perlu sedikit ditinggikan agar ketika hujan turun tidak mengalami banjir.

"Kondisi di dalam museum juga

perlu dipertahankan, seperti tangga, atap, dan lantai yang mungkin kelihatan tidak layak harus segera dilakukan renovasi dengan tidak mengubah bentuk aslinya," harapnya.

Dikarenakan Keraton Sambaliung ini sebagai ikon Berau. Maka disebutnya sangat tidak diperkenankan apabila terdapat perubahan wujud baru dari yang asli.

"Jadi keasliannya tetap terjaga, maka jangan ada perubahan wujud dari yang asli," tandasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Cari Solusi Tekan SiLPA, Madri Pani Minta Ada Rapat Evaluasi

TANJUNGREDEB-Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembenahan soal pengelolaan keuangan.

Dia menuturkan, saat ini masih banyak kinerja OPD yang perlu dievaluasi, salah satunya dalam mengelola keuangan daerah. "Karena kami sebagai pusat kontrol, maka perlu evaluasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi," katanya.

Dirinya menilai, evaluasi seluruh OPD menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Dicontohkannya seperti masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang terjadi tiap tahun.

"Hal itu yang dievaluasi, perlu adanya duduk bersama, karena ini

harus dicari tahu apa penyebabnya karena terjadi di setiap tahun," tegasnya.

Madri menjelaskan, SiLPA merupakan indikator yang perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan dalam tempo cepat. Hal itu, kata dia, agar mengetahui apa yang menjadi penghambat OPD.

"Eksekutif dan kami di legislatif seharusnya ada rapat koordinasi bupati, wakil bupati, sekkab dan OPD terkait sebulan sekali, atau tiga bulan," jelasnya.

Politikus Nasional Demokrat (Nas-Dem) ini menerangkan, jika ada rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin, maka tidak ada alasan untuk tak bisa menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

"Terkecuali masalah teknis, hal

ini juga saya dorong karena sering menerima keluhan mengenai kurangnya anggaran di OPD. Tetapi pada saat diberikan, justru kadang tidak terserap maksimal," bebernya.

"Apakah ini soal birokrasi belum tertata dengan tepat dan benar, apakah karena banyak kekosongan jabatan, pengambil kebijakan," tambahnya.

Kendati demikian, Madri Pani mengingatkan bahwa bentuk perhatian legislatif terhadap eksekutif adalah dengan menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satunya mengingatkan masalah SiLPA.

"Harus bersama mencari solusi. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menyudutkan eksekutif, sama-sama menjalankan peran untuk kepentingan masyarakat," tutupnya. (adv/dez)



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Keliling Kalimantan, DPKD Kaltim Siap Kerja Sama Kembangkan Budaya dan Pelestarian Naskah Kuno

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan berkeliling pulau Kalimantan untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Pengembangan Center of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Taman Pintar Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Juli 2023 lalu.

Keliling Kalimantan ini dalam rangka mengunjungi DPKD yang belum menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan DPKD Kaltim. Sejauh ini yang telah bertanda tangan baru DPKD Kaltara, sisanya adalah Kalsel, Kalteng dan Kalbar.

"Waktu kita rakor, semua perwakilan dari 5 provinsi di Kalimantan itu setuju adanya kerja sama kebudayaan. Tapi waktu itu cuma dihadiri oleh kabit-kabidnya saja. Oleh sebab itu kami yang akan berkunjung ke dinas perpustakaan yang ada di Kalsel, Kalteng dan Kalbar," ungkap Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni saat ditemui Mediakaltim.com di ruang kerjanya Senin (2/10/2023) lalu.

Pihak DPKD Kaltim sudah melakukan rapat internal untuk penentuan kapan akan berangkat keliling ke tiga provinsi tersebut. "Kita target sih bulan Oktober ini jadwal sudah siap, tapi paling tidak November sudah selesai semua PKS ini" tegasnya.

Dengan ditanda tangannya PKS tersebut nantinya, kerja sama antar provinsi se-Kalimantan untuk melestarikan Budaya dan naskah kuno bisa dijalankan.

Kerja sama ini penting karena mengacu pada Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 78a tahun 2011 hanya ada enam Badan Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan menjadi Center of Excellent, dan Kaltim salah satunya.

Penunjukkan Kaltim sebagai Center of Excellent sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga sekarang belum ada perkembangan kegiatan atas program yang harus dijalankan.

Daerah yang ditunjuk sebagai Center of Excellent sendiri memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya dan etnis di Kalimantan.

Selain itu, Irni mengatakan DPKD Kaltim telah mengembangkan website Pustaka Borneo yang akan digunakan

sebagai wadah untuk mengenalkan semua kultur budaya yang ada di Kalimantan.

"Jadi kita juga sudah sosialisasi Web Pustaka Borne, semua konten budaya yang ada di Kalimantan bisa kita muat disana, nanti semua konten budaya yang diajukan dari seluruh Kalimantan, sebelum di upload pastinya akan berkoordinasi dengan kami di sini terlebih dahulu sebagai pengelola website Pustaka Borneo," ujarnya.

Karena pentingnya sejarah, budaya dan kultur Kalimantan untuk dikembangkan, maka DPKD Kaltim berharap hal ini didukung oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar kebudayaan Kalimantan bisa terjaga.

"Tentunya kami juga membutuhkan dukungan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, terutama kalo bisa Anggota DPRD Kaltim pun harus mendukung, agar lebih mudahnya dalam pengembangan kebudayaan, sejarah dan pelestarian naskah-naskah kuno ini," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni SPd MSI



Tampilan dari Kanal YouTube (dari kiri) Moderator Ir. H. Salman Lumoindong, MM dari Widyaswara BPSDM Provinsi Kaltim, Narasumber Hospita Gloria Situmorang, S.H., M.AP, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan, dan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun S.Sos MSI

BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-43 dengan tema "Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional" untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim pada hari Selasa (3/10/2023). Kegiatan yang disiarkan secara live di Channel YouTube BPSDM Kaltim ini dimulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang diwakilkan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun ini, dalam catatannya mengatakan BPSDM Kaltim berkomitmen dan berupaya untuk terus mengem-

bangkan kapasitas ilmu pengetahuan ASN. "Kami tetap optimis untuk terus meningkatkan kapasitas pengetahuan ASN salah satunya dengan menggelar metode sharing Session ini," ujarnya.

Dia berharap para pesertanya ASN fungsional bisa menyerap ilmu yang disajikan dalam sharing session ke-43 ini dengan sebaik-baiknya, terutama ilmu dalam pengelolaan dan pengembangan karir jabatan fungsional. "Kami berharap semua peserta terkhusus ASN dengan jabatan fungsional bisa mengambil ilmu pengetahuan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom untuk para peser-

ta dan acara ini juga disiarkan secara langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim untuk ditonton oleh masyarakat secara umum.

Pada Sharing Session kali ini menampilkan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan Hospita Gloria Situmorang sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Widyaswara BPSDM Kaltim Ir. H. Salman Lumoindong, MM.

Acara ini sejak di buka diikuti 301 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar 300 kali. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

30 Persen Bangunan di Bontang Belum Memiliki PGB

BONTANG - Sekitar 30 persen bangunan di Kota Bontang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PGB). Hal itu diungkapkan Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Idrus saat dihubungi, Selasa (3/10/23).

"30 persen itu sudah berupa bangunan yang biasanya direnovasi atau alih fungsi dari rumah menjadi toko, atau tipe bangunan awalnya tipe 35 diperluas menjadi tipe 45," jelasnya

Ia menjelaskan bahwa kepengurusan tersebut sering terlambat dilakukan karena dulu saat akan membangun mereka hanya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang persyaratan biaya retribusi sebesar Rp 600 ribu dan biaya desain bangunan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, terganti dengan tipe bangunannya.

"Dulu pas masih IMB, yang desain bangunan itu bebas, tidak perlu ar-

sitektur juga tidak apa, lebih murah dan gampang ngurusnya," ujarnya.

Namun semenjak adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang, peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. IMB diubah menjadi PGB yang persyaratannya juga ikut berubah.

Kepengurusan PGB harus melibatkan arsitektur yang sudah bersertifikat dan masuk di dalam Ikatan Arsitektur Indonesia, di mana arsitektur di Kota Bontang hanya dua yang memenuhi kualifikasi tersebut. Karena untuk arsitek mendapatkan sertifikat harus memenuhi kualifikasi juga.

"Dengan melibatkan arsitektur berkualifikasi tentu harga desain bangunan akan lebih mahal, sekitar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta, dan itu bikin mereka berfikir ulang untuk mengurus PGB, karena uangnya bisa dipakai beli material," terangnya.

Untuk harga desain tersebut pemerintah tidak bisa campurtangan, karena penentuan harga tentu ada di arsiteknya langsung. Ia mengungkapkan masyarakat memang sulit beradaptasi kalau ada perubahan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan dinas terkait yang turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi.

"Solusi saat ini, mungkin masih dengan mengadakan pemutihan yang dilakukan PUPRK, karena kami hanya mengeluarkan surat izin saja," imbuh Idrus.

Namun, DPMPTSP tidak mengeluarkan izin juga bisa karena faktor lain, seperti batas bangunan yang diperbolehkan untuk membangun rumah atau gedung atau biasa disebut Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang masi terlalu dekat dengan jalan atau pintu masuk gang.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya
Dengan Bengkel

Kode Promo
BTSOLI

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088



Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Ruangan NICU dan alat inkubator yang ada di RSUD Taman Husada Bontang.

Mengenal Ruang NICU RSUD Bontang, Khusus Bayi dengan Gangguan Nafas dan Berat Badan Rendah

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang kini telah memiliki Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang dikhususkan bagi bayi-bayi sakit level penyakit sedang sampai berat. Misalhnya, bayi prematur yang bermasalah, bayi dengan berat lahir rendah, bayi yang membutuhkan alat bantu pernapasan, serta bayi dengan kelainan kongenital/bawaan lahir.

Dr. Siti Aisyatur Ridha menjelaskan ruang NICU dikhususkan bagi bayi yang memiliki masalah tersebut di atas dengan batasan usia bayi yang dirawat adalah kisaran usia 0-28 hari.

“Bayi-bayi sakit akan ditempatkan di dalam inkubator dan masuk perawatan ruang NICU,” kata dr Ridha saat ditemui Mediakaltim.com.

Untuk lama rawat di NICU bagi bayi yang baru lahir, dr Ridha mengatakan dapat dievaluasi dari kondisi bayi dan kasus penyakit bayi.

“Masing-masing bayi berbeda kasusnya. Kalau memang butuh alat bantu nafas lama kita fasilitasi di sini dan bila masih bermasalah atau butuh konsultasi khusus misalnya pada bayi dengan kelainan kongenital maka kita koordinasi dengan cara dirujuk ke RS rujukan,” katanya.

Ia menambahkan RSUD sendiri memiliki 10 alat inkubator dengan didukung 19 perawat NICU andal yang tersertifikasi dan 3 dokter spesialis anak.

“Semoga RSUD tetap terpercaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat apalagi salah satu misi RSUD Bontang adalah menjadi rumah sakit sayang ibu dan bayi,” terangnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Badak LNG Dianugerahi Patra Nirbhaya Kategori Utama dalam Penganugerahan Keselamatan Migas 2023

JAKARTA - Badak LNG selaku anak perusahaan Subholding Upstream Pertamina menerima penghargaan bergengsi, yaitu Patra Nirbhaya Kategori Utama dalam acara Penganugerahan Keselamatan Migas 2023. Patra Nirbhaya adalah penghargaan nasional yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Migas kepada Perusahaan yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam menjalankan operasi bisnis tanpa kehilangan jam kerja akibat kecelakaan.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Dirjen Migas Tutuka Ariadji kepada Director & COO Badak LNG Teten Hadi Rustendi pada Selasa (3/10/2023) bertempat di JW Marriott Hotel Jakarta. Penghargaan ini adalah pengakuan atas prestasi Badak LNG yang berhasil mencapai lebih dari 124 juta jam kerja aman tanpa kehilangan hari kerja karena kecelakaan sejak 8 Desember 2006. Badak LNG telah berhasil mempertahankan capaian jam kerja aman ini selama lebih dari 16 tahun.

Director & COO Badak LNG, Teten Hadi Rustendi mengungkapkan rasa syukur atas diterimanya penghargaan ini.

"Penerimaan Penghargaan Patra Nirbhaya Kategori Utama ini adalah pencapaian luar biasa bagi tim kami yang berkomitmen untuk

menjaga keselamatan di tempat kerja. Dengan diraihnya penghargaan ini menegaskan komitmen Badak LNG terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam semua aspek operasionalnya," ungkap Teten.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Badak LNG berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi ini dengan mengembangkan dan mengintegrasikan keselamatan kerja ke dalam

seluruh aspek bisnis dan produksinya. Memperkuat peran dan tanggung jawab seluruh tingkatan pekerja dalam mengimplementasikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL). Serta terus menerapkan perilaku aman dalam setiap kegiatan. Badak LNG akan terus berupaya mempertahankan predikatnya sebagai perusahaan LNG yang aman dan andal. (ADV)



— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Biggen Kawana No. 116A, Sebelang Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

AYO IKUTI!!
LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
PERAN PUPR
MENDUKUNG INFRASTRUKTUR
DESTINASI WISATA

TOTAL HADIAH 33 JUTA RUPIAH

DAFTAR SEGERA

<https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>

NARAHUBUNG / CP :
Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesucilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)



Kebakaran yang terjadi di RT 4 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Rabu (4/10) sekitar pukul 00.45 WITA.

Malam Mencekam di Balikpapan, Si Jago Merah Membakar Rumah Warga di Kelurahan Damai

BALIKPAPAN - Musibah kebakaran terjadi di Kota Balikpapan, tepatnya di kawasan Jalan MT Haryono RT 4 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 00.45 WITA.

Mulyadi (43), warga setempat, mengatakan bahwa dia mengetahui adanya kebakaran itu setelah mendengar teriakan sejumlah warga dari belakang rumahnya.

"Saya pas mau tidur, tiba-tiba denger orang-orang itu teriak. Jam 12-an lewat itu," ujarnya.

Api hanya berjarak dua rumah dari tempat tinggalnya, sehingga Mulyadi langsung membangunkan anak dan istrinya serta menyelamatkan sejumlah barang berharga.

"Langsung anak istri dulu yang saya selamatkan. Itu bangunan disamping punya saya, baru saya renovasi kena sedikit," jelasnya.

Petugas pemadam sempat mengalami kendala, hal ini karena kesulitan menuju titik api, mengingat lokasi rumah yang tepat berada di tengah pemukiman yang padat dan menanjak.

Kepala UPT BPBD wilayah Timur, Ridwan, mengatakan bahwa medan yang menanjak serta akses jalan yang sempit menjadikan petugas harus berusaha mencari jalan lain dan memutar.

"Kondisi cukup sulit, karena tadinya di belakang sini agak naik, menyulitkan petugas untuk bisa ke TKP," ujar Ridwan.

Dari kawasan itu, petugas hanya bisa sampai di parkir rumah makan, kemudian membentangkan selang melewati tanah urukan sekitar satu meter.

"Kemudian jalan yang ada, di samping Hotel Zurich yang tembus Gang

Mufakat, itu nggak bisa dilewati kendaraan besar, cuma bisa kendaraan kecil, itupun nggak bisa sampe masuk jauh ke dalam," jelasnya.

Api baru bisa dikuasai satu jam kemudian setelah hampir seluruh unit yang dibantu oleh SAR Brimob dengan watercanonnya dikerahkan untuk menuju ke titik api.

"Untuk laporan awal kami kurang tahu persis sebab setelah laporan masuk langsung menuju ke TKP, dan kami bisa kuasai keadaan sekitar pukul 01.30 WITA," tambah Ridwan.

Hingga api berhasil dipadamkan, belum ada informasi resmi mengenai total rumah yang terbakar, namun berdasarkan pantauan media ini, terdapat tiga rumah yang terbakar. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Kasat Reskrim, Iptu Hari Supranoto saat menunjukkan BB saat memberikan konferensi pers di Polres Bontang.

Polres Bontang Amankan Pasangan Kekasih Pelaku Aborsi, Usia Janin 4 Bulan

BONTANG – Polres Bontang mengungkap kasus pengguguran janin atau aborsi yang dilakukan laki-laki inisial SR (23) dan perempuan inisial MT (21) sebagai sepasang kekasih. Pengungkapan aborsi janin berusia 4 bulan ini terungkap pada Kamis (14/9/2023) pukul 11.20 Wita di salah satu penginapan jalan Sultan Syahrir Tanjung Laut Indah.

Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Hari Supranoto menjelaskan kedua pelaku melakukan tindakan aborsi agar kehamilan tidak diketahui oleh siapa pun. Hari menambahkan SR aktif melakukan komunikasi dengan MT untuk melakukan aborsi dengan membeli obat penggugur janin.

“SR aktif berkomunikasi dengan

melakukan pembelian obat penggugur janin. Obat datang tanggal 14 September kemudian meminum obat dalam waktu satu malam,” kata Iptu Hari Supranoto saat konferensi pers, Selasa (3/10/2023) di Mako Polres Bontang.

Selanjutnya, atas kejadian itu Satrikreskrim Polres Bontang melakukan penelusuran tempat kejadian dan tempat janin dikuburkan.

“Pelaku mengakui perbuatan melakukan aborsi bersama MT. Kemudian melakukan penelusuran ke tempat janin dikuburkan,” katanya.

Adapun barang bukti yang diamankan yakni dua alat komunikasi telepon seluler, bukti percakapan dan foto-foto hasil janin aborsi dan

selimut yang digunakan. “Barang bukti kerangka janin kita serahkan ke RSUD,” katanya.

Hari mengatakan untuk pasal yang disangkakan yakni pasal 77A ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Barang siapa yang melakukan aborsi dengan tata cara yang tidak benar sesuai dengan perundang-undangan akan dikenakan pidana 10 tahun dan denda 1 milyar,” tegas Hari.

*Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari*



ISTIMEWA

Proses distribusi air dalam penanganan karhutla di PPU.

Dampak Fenomena El-Nino: Desa Rintik dan Sumber Sari Alami Krisis Air Bersih

PPU - Tidak hanya di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), krisis air bersih juga melanda Kecamatan Babulu. Musim kemarau kali ini, warga Desa Sumber Sari dan Rintik menghadapi kekeringan sumber air yang serius dan memohon bantuan pemerintah.

Menghadapi situasi ini, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, telah menginstruksikan pengiriman 4 armada tangki air ke kedua desa ini. Langkah ini merupakan komitmen Pemkab PPU dalam membantu masyarakat mengatasi dampak kekeringan.

"Ini merupakan langkah berikutnya dalam upaya pendanaan penanggulangan bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujarnya pada Senin (2/10/2023).

OPD terkait PPU telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran dan kekeringan pada Minggu (1/10/2023) malam. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga mengundang perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan

Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), A Rino Rio, melalui jalur daring.

"Momentum ini penting untuk mempercepat penanganan bencana kekeringan dan karhutla yang telah memasuki status siaga darurat di wilayah PPU," jelas Makmur.

Selain masalah kekeringan, wilayah PPU telah mengalami lebih dari 30 kasus karhutla sejak Juli 2023. Pemkab PPU juga memberikan perhatian penuh terhadap isu ini.

Setelah melakukan berbagai upaya bersama Polres PPU dan Kodim 0913/PPU dalam menangani karhutla, Makmur menyimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu aspek yang krusial adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar peristiwa karhutla tidak terulang, terutama dalam konteks fenomena El-Nino.

"Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, terutama perangkat keca-

matan, desa, dusun, dan RT/RW," katanya.

Instruksi terkait akan diumumkan melalui Surat Edaran Bupati PPU yang akan diterbitkan pada hari ini. Makmur juga menegaskan bahwa ia akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi larangan karhutla di wilayah kecamatan, desa, dusun, serta RT/RW yang dilakukan oleh camat, kepala desa, dan ketua dusun terkait.

Selain itu, sosialisasi mengenai bencana ini juga perlu dilakukan oleh pemuka agama dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Hal ini sejalan dengan komitmen semua perangkat daerah dan elemen di PPU untuk bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih dan karhutla ini.

"Saya meminta agar deteksi dini selalu dilakukan. Kita tidak boleh menunggu, jika ada masalah, segera laporkan kepada saya agar saya dapat mengambil langkah sebagai kepala daerah," tegasnya. (SBK)



PT Kideco Jaya Agung dianugerahi penghargaan Subroto 2023.

Kideco Raih Penghargaan Bergengsi Subroto 2023

PASER - Inovasi penyediaan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas pembibitan atau persemaian (Nursery) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, antarkan PT Kideco Jaya Agung (Kideco) anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk meraih penganugerahan penghargaan Subroto 2023.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, 29 September 2023 lalu. Acara itu puncak rangkaian kegiatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-78 yang mengusung tema "Energi Masa Depan Bumi".

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Suswanto menyerahkan langsung dan diterima Direktur PT Kideco Jaya Agung, M Kurnia Ariawan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan penghargaan Subroto merupakan apresiasi tertinggi kepada para pemangku kepentingan.

"Di mana telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di

Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir," kata Arifin Tasrif.

Ia menambahkan situasi energi di Indonesia sangat dipengaruhi dinamika global antara lain konflik geopolitik dan kondisi perubahan iklim akibat pemanasan global. "Pelaksanaan transisi energi semakin penting dan perlu dipercepat untuk mencapai target net zero emission pada 2060," sebutnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut penghargaan Subroto tahun ini diberikan kepada 62 pemenang dari 14 bidang penghargaan yang diusulkan oleh delapan unit eselon satu di lingkungan Kementerian ESDM.

Jumlah bidang penghargaan ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 13 bidang penghargaan untuk 66 pemenang. "Hal ini memberikan kesempatan lebih untuk penggiat sektor energi untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan dan memajukan sektor ESDM kedepannya," tutur Dadan.

Sementara M Kurnia Ariawan menghaturkan terima kasih atas

penghargaan yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Katanya, anugerah itu menjadi semangat baru dan tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di dalam kegiatan operasional bisnis PT Kideco Jaya Agung.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Kideco mengedepankan keberlanjutan bisnis dan terus memberikan dampak positif secara nyata kepada masyarakat dan lingkungan melalui program-program ESG (Environmental, Social, Governance) yang telah ditetapkan," terang Kurnia.

Diketahui penganugerahan penghargaan Subroto tahun ini kembali digelar untuk keenam kalinya sejak tahun 2017. Dalam acara itu juga hadir Kepala Teknik Tambang Kideco, Ikhsan Alman Latif, sebagai penanggungjawab dalam implementasi program lingkungan perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Subroto 2023.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

Kasus Bullying Viral di Cilacap dan Balikpapan, Hetifah Angkat Bicara

SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perbuatan bullying di sekolah adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dicegah. Hal itu dikemukakannya berkaitan dengan kasus bullying siswa sekolah yang terjadi di Cilacap dan Balikpapan yang lagi viral di media sosial.

“Jadi bullying bukan sesuatu yang biasa, jangan sampai ada tindakan kekerasan sesama teman di lingkungan sekolah,” ujar Hetifah.

Ia mengatakan praktik-praktik bullying bukan hanya fisik kadang juga nonfisik. Misalnya, berkata kasar atau bahkan perundungan di dunia maya (cyber bullying).

Hetifah menjelaskan pemerintah telah meluncurkan episode ke -25 yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan

bahwa kekerasan di sekolah bisa diminimalisir sebanyak mungkin.

“Pihak sekolah harus punya channel untuk mengadu jika peserta didik terkena masalah, selain itu guru BK harus beda, jangan jadi killer terus ditakuti tapi menjadi teman yang baik bagi peserta didik,” kata Hetifah.

Hetifah juga menyoroti peran orang tua dalam mencegah bullying di sekolah. Menurutnya orang tua harus menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak, bukan menekan atau membully mereka, yang kemungkinan akan melampiaskan ke teman sejawatnya.

“Jadi supaya membentuk mental anak dari kecil, maka bisa PAUD sehingga punya jiwa kreatif, karena seorang anak dalam keadaan tertekan tidak mungkin jadi kreatif,” ucapnya.

Hetifah mengimbau agar orang

tua membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak-anaknya. Orang tua harus mengetahui masalah yang dihadapi anak, termasuk jika mereka mengalami bullying di sekolah.

“Sebagai orang tua kita harus punya komunikasi yang lebih tertata dan percaya dengan anak. Orang tua harus berubah jadi teman bagi anak-anak,” tuturnya.

Hetifah menambahkan pemerintah juga telah melakukan assesment terhadap sekolah-sekolah terkait isu bullying.

“Jika ada sekolah yang terbukti melakukan bullying, maka rapor mereka akan merah. Tetapi jika sekolah terlihat menyenangkan biasanya prestasi anak lebih bagus,” jelas Hetifah. (MK)



Tok! DPR Setujui Revisi UU IKN, Simak 7 Poin Penting Perubahannya

JAKARTA-DPRRI resmi menyetujui hasil keputusan Revisi Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (3/10/2023) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Rachmat Gobel hingga Lodewijk F Paulus.

Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan laporan mengenai rumusan revisi UU IKN tersebut.

Dia menjelaskan bahwa tujuh fraksi, yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujui

rancangan revisi tersebut.

Sementara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolaknya. Fraksi partai Demokrat menyetujui RUU IKN dengan catatan untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat II sebelum disahkan menjadi UU.

Dasco meminta persetujuan revisi UU IKN dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta rapat, yang diikuti oleh jawaban "setuju" dari peserta rapat.

Revisi UU IKN mencakup tujuh poin penting perubahan, antara lain penetapan batas wilayah, penguatan kelembagaan IKN, pemenuhan kompetensi SDM, serta penataan ruang

yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.

Selain itu, revisi UU IKN juga mencakup regulasi mengenai status tanah penguasaan tanah, pengoptimalan kewenangan IKN, percepatan penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan peninjauan badan otoritas IKN di bawah DPR, dan menjamin kepastian hukum pelaku usaha (insentif). (MK)

Editor: Agus Susanto



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP

